



---

## MANAJEMEN KURIKULUM DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C (STUDI MULTISITUS DI SPNF SKB KOTA YOGYAKARTA DAN SPNF SKB KOTA SURAKARTA)

Atika Mega Jingga<sup>1(\*)</sup>, Slamet Lestari<sup>2</sup>  
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia<sup>12</sup>  
atikamega.2023@student.uny.ac.id<sup>1</sup>, slamet\_lestari@uny.ac.id<sup>2</sup>

---

### Abstract

Received: 30 Agustus 2025  
Revised: 18 September 2025  
Accepted: 20 September 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kurikulum, kendala yang dihadapi, serta solusi untuk mengatasi kendala terkait manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian multisitus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis situs tunggal dan analisis data lintas situs. Pengecekan keabsahan data dengan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua SPNF SKB telah menerapkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka secara adaptif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan karakteristik lokal. Manajemen kurikulum dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan berbasis kebutuhan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan pembelajaran kontekstual, serta evaluasi berkelanjutan. Temuan juga menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip dasar pengelolaan kurikulum, namun terdapat perbedaan dalam pengorganisasian sumber daya dan strategi pelaksanaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pengelola dan pendidik, pengembangan kurikulum kontekstual, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program pendidikan kesetaraan.

**Keywords:** Manajemen Kurikulum; Mutu Pendidikan; Paket C; Studi Multisitus

(\*) Corresponding Author: Jingga, atikamega.2023@student.uny.ac.id

**How to Cite:** Jingga, A. M. & Lestari, S. (2025). MANAJEMEN KURIKULUM DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C (STUDI MULTISITUS DI SPNF SKB KOTA YOGYAKARTA DAN SPNF SKB KOTA SURAKARTA). *Research and Development Journal of Education*, 11(2), 903-913

---

### INTRODUCTION

Pendidikan memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun masyarakat yang cerdas dan kompeten. Salah satu metode untuk mengevaluasi pendidikan di suatu negara adalah dengan mengamati sistem pendidikan yang diterapkan Kurikulum sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga memerlukan manajemen yang efektif. Berangkat dari pernyataan bahwa manajemen kurikulum adalah proses kolaboratif, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna meningkatkan mutu interaksi dalam belajar mengajar (Nasbi, 2017; Lazwardi, 2017), maka pengelolaan kurikulum

harus dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien. Di Indonesia, pendidikan kesetaraan khususnya Program Paket C merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif serta pembentukan sikap dan kepribadian yang profesional.

Akan tetapi pendidikan kesetaraan menghadapi permasalahan yaitu anggapan bahwa pendidikan kesetaraan, terutama paket A, B, dan C, dianggap sebagai "pendidikan kelas dua" atau pendidikan yang lebih rendah dibandingkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah persepsi masyarakat, pendidikan formal sering kali lebih dihargai karena memiliki kurikulum yang seragam dan diakui oleh pemerintah secara nasional, serta menghasilkan ijazah yang diakui di seluruh Indonesia. Sebaliknya, pendidikan kesetaraan sering dipandang tidak sepenuhnya setara dengan pendidikan formal, meskipun dalam praktiknya tujuan dan materinya setara. Tantangan berikutnya yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman para tutor dalam mengelola pembelajaran yang disesuaikan dengan beragam karakteristik peserta didik dewasa pada pendidikan kesetaraan turut menimbulkan anggapan bahwa mutu pendidikan ini lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan formal (Raharjo & Suminar, 2019).

Selain itu, perubahan kurikulum yang sering terjadi di Indonesia memiliki dampak signifikan bagi pendidikan di Indonesia, terlebih pada pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan kurikulum baru, hal ini tentu saja menjadi tantangan karena menciptakan kebingungan dalam implementasi, kualitas pembelajaran yang menurun serta keterbatasan waktu untuk penyesuaian (Widiastuti, 2019). Meskipun perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seringkali perubahan yang terlalu cepat dan tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan kebingungan dan tentu saja menjadi penyebab menurunnya kualitas pendidikan kesetaraan.

Masalah lain yang dihadapi pendidikan kesetaraan adalah kesulitan akreditasi dan pengakuan, meskipun peserta didik pendidikan kesetaraan bisa mendapatkan ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan formal, ada stigma dalam masyarakat yang menganggap bahwa ijazah pendidikan kesetaraan tidak memiliki "nilai" yang sama dengan ijazah pendidikan formal (Setiawan, 2015). Hal ini didukung temuan Laksono et al. (2023) dalam penelitian mereka yang berjudul "Pengaruh Stigma Lulusan Pendidikan Kesetaraan Terhadap Keputusan Rekrutmen di Dunia Kerja", menemukan bahwa sebagian besar pemberi kerja memandang lulusan pendidikan kesetaraan lebih rendah karena dianggap mudah meraih ijazah tanpa kualitas yang setara, diakibatkan fleksibilitas dalam sistem pembelajaran. Hasil survei 100 HRD di Tasikmalaya menunjukkan stigma positif maupun negatif memberikan pengaruh meski tidak signifikan secara statistik, terhadap keputusan perekrutan lulusan pendidikan kesetaraan. SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta sebagai penyelenggara pendidikan nonformal memiliki pendekatan dan karakteristik berbeda dalam manajemen kurikulumnya, sehingga layak dijadikan objek penelitian secara multisitus.

Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan pentingnya manajemen kurikulum dalam upaya peningkatan mutu pendidikan kesetaraan. Studi yang dilakukan oleh Pangestu et al. (2021), Syaputra & Shomedran (2023), serta Fauziyah & Ibrahim (2024) menekankan urgensi perencanaan yang fleksibel, pelaksanaan berbasis keterampilan hidup (life skills), serta evaluasi yang bersifat partisipatif sebagai komponen strategis dalam pengelolaan kurikulum pendidikan kesetaraan.

Penelitian ini difokuskan pada analisis manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan pada dua Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) SKB, melalui pendeskripsian dan analisis terhadap pelaksanaan manajemen kurikulum Program Paket C, identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta pengungkapan berbagai strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan memanfaatkan data hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pendidikan kesetaraan, khususnya Program Paket C, tidak hanya di Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, tetapi juga sebagai rujukan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan kesetaraan di tingkat nasional.

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian multisitus, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di dua lokasi berbeda: SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam konteks dan dinamika pengelolaan kurikulum di masing-masing lembaga, yang memiliki karakteristik berbeda namun tujuan yang serupa. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu: SPNF SKB Kota Yogyakarta, sebagai lembaga percontohan pendidikan nonformal yang terakreditasi A dan memiliki infrastruktur pembelajaran memadai. SPNF SKB Kota Surakarta, sebagai lembaga rujukan di wilayah Jawa Tengah yang juga terakreditasi A dan dikenal aktif dalam inovasi pembelajaran kesetaraan. Subjek penelitian meliputi: kepala satuan pendidikan, pamong belajar, tutor, staf pengelola kurikulum, dan warga belajar.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: Wawancara mendalam, dilakukan terhadap kepala SKB, pamong belajar, dan tutor, untuk memperoleh data mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Observasi partisipatif, digunakan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran, interaksi antar pelaku pendidikan, serta dokumentasi pembelajaran. Studi dokumentasi, digunakan untuk melengkapi data dari dokumen-dokumen resmi lembaga seperti silabus, rencana pembelajaran, struktur kurikulum, laporan evaluasi, dan agenda rapat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles et al. (2014) yang terdiri atas tiga tahapan: Reduksi data, menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data, menyusun data dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dianalisis. Penarikan kesimpulan, menghasilkan temuan-temuan tentang praktik manajemen kurikulum di kedua SKB. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa teknik triangulasi: Triangulasi sumber (membandingkan informasi dari kepala SKB, tutor, dan warga belajar), Triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), Triangulasi waktu (pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang berbeda untuk memperoleh keakuratan).

## RESULTS & DISCUSSION

### *Results*

SPNF SKB Kota Yogyakarta merupakan satuan pendidikan nonformal unggulan dengan akreditasi A. Memiliki infrastruktur yang baik, sumber daya manusia yang kompeten (pamong belajar dan tutor lulusan S1–S2), serta melaksanakan asesmen nasional mandiri. SKB ini mampu menyelenggarakan Program Paket A, B, dan C dengan sistem pembelajaran terstruktur. SPNF SKB Kota Surakarta. Juga berakreditasi A, lembaga ini dikenal dengan inovasi pembelajaran berbasis budaya lokal dan penguatan partisipasi masyarakat. Pengelolaan kurikulum dilakukan secara partisipatif, melibatkan warga belajar, pamong belajar, dan komunitas. Meski tidak semapan SKB Yogyakarta dalam fasilitas, SKB Surakarta kuat dalam aspek kultural dan pemberdayaan masyarakat.

Manajemen kurikulum diawali dengan perencanaan kurikulum, temuan di SPNF SKB Kota Yogyakarta, perencanaan dilakukan terstruktur melalui rapat rutin bersama tim pengelola, pamong belajar, dan tutor. Kurikulum disusun mengacu pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan warga belajar. Sedangkan di SPNF SKB Kota Surakarta, perencanaan lebih fleksibel dan kontekstual. Warga belajar dilibatkan dalam proses penyusunan jadwal dan materi pembelajaran. Pendekatan partisipatif menjadi ciri khasnya. Kedua lembaga menerapkan pendekatan kontekstual dalam merancang kurikulum, tetapi SKB Yogyakarta lebih formal dan sistematis, sementara Surakarta lebih adaptif dan berbasis komunitas. Pengorganisasian Kurikulum, Yogyakarta: Struktur organisasi jelas, pembagian tugas tegas antara pamong belajar, tutor, dan staf. Jadwal pembelajaran dirancang rinci, dan sumber daya diatur optimal. Surakarta: Meskipun lebih sederhana, pengorganisasian dilakukan secara gotong royong dan mengandalkan fleksibilitas. Tutor sering merangkap tugas administratif. Temuan: Keterbatasan sumber daya di Surakarta diatasi dengan kolaborasi internal dan pendekatan kekeluargaan. Pelaksanaan Kurikulum, Yogyakarta: Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode klasikal, diskusi, tugas mandiri, dan pembelajaran berbasis TIK. Ada kombinasi antara tatap muka dan daring. Surakarta: Lebih menekankan pada pendekatan andragogis, seperti diskusi kelompok kecil, refleksi pengalaman, dan penyampaian berbasis budaya lokal. Temuan: Keduanya menerapkan prinsip fleksibilitas sesuai karakteristik warga belajar dewasa. Evaluasi Kurikulum, Yogyakarta: Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi program, refleksi pamong belajar, serta penilaian hasil belajar peserta. Surakarta: Evaluasi bersifat informal dan lebih banyak bergantung pada umpan balik dari warga belajar dan tutor. Temuan: Evaluasi di Yogyakarta lebih sistematis, sedangkan di Surakarta lebih partisipatif. Kendala dalam Manajemen Kurikulum. Keterbatasan SDM dan dana, terutama di Surakarta. Perubahan kurikulum nasional yang cepat menyulitkan adaptasi. Minimnya pelatihan khusus bagi tutor kesetaraan. Stigma masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan yang dianggap inferior. Upaya Mengatasi Kendala Yogyakarta: Pelatihan rutin untuk tutor dan pamong belajar. Pemanfaatan TIK dan ANBK mandiri. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Surakarta: Inovasi pembelajaran kontekstual. Peningkatan motivasi melalui pendekatan budaya lokal. Membangun kepercayaan masyarakat melalui kegiatan kemasyarakatan.

### *Discussion*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana manajemen kurikulum diimplementasikan dalam Program Pendidikan Kesetaraan Paket

C, serta kontribusinya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan temuan lapangan di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta, pembahasan ini mengacu pada beberapa teori relevan tentang manajemen kurikulum dan mutu pendidikan.

### **Manajemen Kurikulum pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta**

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan kurikulum menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kurikulum yang tetap berlandaskan pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Pendidikan Kesetaraan sebagai acuan nasional, namun dengan berbagai bentuk penyesuaian kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik setempat. Implementasi kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang sangat beragam, baik dari segi usia, status sosial ekonomi, latar belakang pekerjaan, hingga hambatan belajar. Oleh karena itu, pengelola satuan pendidikan melakukan penyesuaian dalam bentuk pengayaan materi berbasis muatan lokal, pengaturan waktu belajar yang fleksibel, dan pengintegrasian keterampilan vokasional sesuai potensi wilayah setempat. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa perencanaan kurikulum program pendidikan kesetaraan Paket C dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu secara internal dan secara eksternal. Kolaborasi ini penting agar implementasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat berjalan secara optimal. Dalam hal ini, kepala SKB bersama tim pengelola memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa proses perencanaan kurikulum melibatkan semua pihak terkait guna mencapai tujuan kurikulum secara maksimal.

Manajemen kurikulum juga terdapat pengorganisasian kurikulum, proses pengorganisasian kurikulum ini dilakukan melalui pembagian tugas, jadwal pembelajaran yang fleksibel, serta pemetaan silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang disesuaikan dengan karakteristik warga belajar. Hal ini sesuai dengan konsep Sudjana (2001) bahwa pengorganisasian kurikulum memerlukan pengelolaan sumber daya secara efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Pernyataan ini didukung dengan pendapat Mulyasa (2009), yaitu dalam implementasi kurikulum, perlu adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di antara pendidik, kepala satuan pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kurikulum.

Komposisi dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) baik di SPNF SKB Kota Yogyakarta maupun SPNF SKB Kota Surakarta berperan dengan baik sesuai dengan kebutuhan program kesetaraan, yaitu kepala SKB dan koordinator program berperan dalam merancang dan mengkoordinasi perencanaan kurikulum, pamong belajar bertugas dalam implementasi pembelajaran serta sebagai penghubung antara peserta didik dan lembaga, serta tutor yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran, termasuk dalam menyusun RPP, menyampaikan materi, dan melakukan asesmen.

Selanjutnya pada pelaksanaan kurikulum menunjukkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis pengalaman hidup warga belajar. Hal ini sesuai dengan gagasan Kauchak & Eggen (2012) yang menyatakan bahwa pembelajaran efektif harus memperhatikan latar belakang dan pengalaman peserta didik agar mereka dapat membangun pengetahuan secara aktif. Pendekatan ini tampak dalam bagaimana pendidik menyesuaikan materi, metode, dan strategi pembelajaran dengan kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan individual warga belajar. Fleksibilitas dalam pelaksanaan kurikulum memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap karakteristik peserta didik yang

heterogen, baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman kerja dan kehidupan.

Temuan terkait dengan pelaksanaan kurikulum menunjukkan bahwa terdapat empat kategori kelas yang berbeda dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan di SPNF SKB Kota Yogyakarta, yaitu: kelas Rumah Tahanan (Rutan), kelas Lembaga Masyarakat (Lapas), kelas Karyawan, dan kelas Reguler. Meskipun terdapat perbedaan dalam lokasi dan waktu pelaksanaan pembelajaran, kurikulum yang diterapkan pada masing-masing kelas tetap sama. Diferensiasi waktu dan tempat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan ketersediaan waktu belajar peserta didik, khususnya bagi mereka yang telah bekerja.

Demikian halnya dengan pelaksanaan kurikulum di SPNF SKB Kota Surakarta, diawali dengan proses identifikasi kebutuhan belajar masyarakat sebagai bentuk penyesuaian terhadap karakteristik dan kondisi peserta didik. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan hasil identifikasi pada tahun berjalan, tetapi juga mengacu pada evaluasi hasil pembelajaran tahun sebelumnya. Misalnya, dalam mata pelajaran Pemberdayaan, ditemukan bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memilah dan mengelola sampah domestik. Permasalahan ini kemudian diangkat menjadi fokus pembelajaran sebagai bagian dari upaya pemberdayaan peserta didik agar memiliki keterampilan dasar dalam pengelolaan sampah.

Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, termasuk dalam program pendidikan kesetaraan Paket C. Menurut Arikunto (2009), evaluasi formatif berguna untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran secara dini dan memperbaikinya segera, sedangkan evaluasi sumatif berfungsi untuk menilai hasil belajar secara keseluruhan setelah proses pembelajaran selesai. Selain sebagai alat ukur keberhasilan belajar, evaluasi juga memiliki fungsi reflektif, yaitu digunakan untuk meninjau dan memperbaiki keseluruhan pelaksanaan program. Pelaksanaan evaluasi kurikulum di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta telah sejalan dengan prinsip-prinsip evaluasi yang dikemukakan sebelumnya. Kedua lembaga tersebut melaksanakan evaluasi formatif dan sumatif secara proporsional, meskipun saat ini masih menerapkan dua kurikulum secara bersamaan, yakni Kurikulum 2013 untuk kelas XII dan Kurikulum Merdeka untuk kelas X dan XI. Perbedaan kurikulum ini tidak menimbulkan perbedaan signifikan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

### **Kendala dalam Manajemen Kurikulum Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala dalam perencanaan kurikulum terletak pada pengembangan kurikulum. Menurut Sukmadinata (2009), pengembangan kurikulum memerlukan keterlibatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi profesional dalam bidang pendidikan, pemahaman tentang karakteristik peserta didik, serta kemampuan untuk merespons dinamika sosial dan teknologi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak lembaga pendidikan, termasuk dalam program kesetaraan, yang menghadapi keterbatasan dalam hal kualitas dan kuantitas SDM pengembang kurikulum. Keterbatasan ini mencakup minimnya tenaga pendidik yang memiliki pelatihan dalam perencanaan kurikulum, kurangnya kemampuan melakukan analisis kebutuhan peserta didik, serta terbatasnya pengalaman dalam menyusun pembelajaran yang kontekstual dan fleksibel.

Di kedua lokasi, peserta didik Program Paket C menunjukkan keragaman dari sisi usia, latar belakang pendidikan, dan motivasi belajar. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam komposisi dan kebutuhan mereka, SPNF SKB Kota Yogyakarta

memiliki lebih banyak peserta didik dewasa, termasuk pekerja swasta, pegawai ASN maupun non ASN, para tahanan dan narapidana, juga remaja putus sekolah dengan keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memperoleh ijazah setara SMA untuk kebutuhan kerja.

SPNF SKB Kota Surakarta justru memiliki lebih banyak peserta didik yang relatif lebih muda, sebagian besar adalah peserta didik dari pondok pesantren yang membutuhkan ijazah formal, karena di pondok pesantren tempat mereka berasal hanya berfokus pada pendidikan tahfiz Al-Qur'an, dan hanya memiliki beberapa orang peserta didik dewasa, termasuk pekerja informal dan ibu rumah tangga, yang mengikuti Program Paket C untuk kepentingan pemberdayaan diri dan kebutuhan administratif. Perbedaan ini menuntut adanya pendekatan kurikulum yang kontekstual dan adaptif. Namun, karena kurikulum nasional bersifat seragam, kedua lembaga menghadapi keterbatasan dalam memberikan layanan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing peserta didik. Temuan ini menguatkan teori Tyler (1949) bahwa kurikulum seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial dan kultural mereka. Dalam hal ini, kurikulum nasional yang kaku cenderung mengabaikan prinsip ini. Perbandingan antara SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta menunjukkan bahwa meskipun kurikulum nasional diterapkan secara seragam, kebutuhan peserta didik yang berbeda di masing-masing lokasi menuntut fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Ketika fleksibilitas ini terbatas, maka efektivitas pembelajaran akan terhambat. Oleh karena itu, kebijakan kurikulum nasional perlu memberikan ruang lebih besar untuk diferensiasi dan adaptasi lokal, terutama dalam konteks pendidikan nonformal.

Selanjutnya kendala yang ditemui pada pengorganisasian kurikulum yaitu jumlah tutor terbatas dan tidak semua memiliki kompetensi pedagogis yang sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Berdasarkan hasil penelitian di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta, ditemukan bahwa keterbatasan jumlah tutor dan variasi kompetensi pedagogis merupakan tantangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, tutor di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas tutor melalui pelatihan berkelanjutan, pemberdayaan komunitas belajar tutor, serta perencanaan kebutuhan tenaga pengajar yang berbasis analisis kebutuhan lokal.

Kendala yang ditemukan selanjutnya adalah penugasan tutor kadang tidak proporsional dengan beban mata pelajaran atau jumlah peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kedua lokasi penelitian, yaitu SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta, masih ditemukan penugasan tutor yang tidak proporsional terhadap beban mata pelajaran maupun jumlah peserta didik yang harus dibina. Di SPNF SKB Kota Yogyakarta, misalnya, terdapat tutor yang mengampu lebih dari satu mata pelajaran, seperti tutor yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus Bahasa Inggris. Hal serupa juga ditemukan di SPNF SKB Kota Surakarta, di mana satu orang tutor bisa menangani lebih dari dua kelompok belajar dengan jumlah peserta didik yang relatif besar, mencapai lebih dari 25 orang per kelompok.

Selanjutnya kendala yang ditemui pada pelaksanaan kurikulum yaitu kehadiran dan motivasi belajar peserta didik yang fluktuatif karena sebagian besar sudah bekerja atau memiliki tanggung jawab keluarga. Fluktuasi kehadiran dan motivasi belajar peserta didik merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta.

Evaluasi kurikulum menemui kendala yaitu evaluasi pembelajaran masih dominan berbasis kognitif dan kurang mencerminkan kompetensi keterampilan dan sikap, hal ini berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen evaluasi di Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta, ditemukan bahwa evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para tutor cenderung masih terfokus pada aspek kognitif. Bentuk evaluasi yang paling dominan adalah tes tertulis, baik dalam bentuk pilihan ganda maupun uraian. Evaluasi terhadap aspek keterampilan (psikomotorik) dan sikap (afektif) belum terlaksana secara optimal dan terstruktur.

Kendala selanjutnya yaitu kurangnya instrumen evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik nonformal. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah masih kurangnya instrumen evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik pada pendidikan nonformal, khususnya dalam Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta. Temuan ini mengacu pada pernyataan dari Depdiknas (2006) yang menyebutkan bahwa sistem evaluasi dalam pendidikan nonformal masih cenderung meniru sistem pendidikan formal dan belum sepenuhnya dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik nonformal. Instrumen evaluasi yang digunakan di kedua lembaga SKB masih dominan berupa tes tertulis dengan model pilihan ganda dan uraian.

Selain sumber daya manusia, anggaran juga merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam praktik manajemen kurikulum. Pendanaan program Pendidikan Kesetaraan diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kesetaraan, serta dukungan dari pemerintah daerah. Di kedua situs penelitian, anggaran dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aspek pelaksanaan kurikulum, antara lain pengadaan modul, pelatihan tutor, pengembangan media pembelajaran, kegiatan evaluasi, dan pembelajaran di luar kelas (*outing class*). Namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala, khususnya dalam upaya pengembangan profesional berkelanjutan bagi sumber daya manusia dan penerapan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

### **Solusi Terkait Kendala dalam Manajemen Kurikulum Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta**

Solusi dalam perencanaan kurikulum pertama yaitu peningkatan kapasitas tutor dan pengelola melalui pelatihan dalam perencanaan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik. Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan, keberhasilan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat, terutama tutor dan pengelola program. Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Menurut Rusman (2011), perencanaan kurikulum yang efektif harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik (*learner-centered curriculum*). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa peserta didik merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran, sehingga kurikulum perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik, minat, pengalaman belajar sebelumnya, serta kebutuhan masa depan mereka. Oleh karena itu, tutor dan pengelola perlu memiliki kapasitas analitis dan teknis dalam menyusun kurikulum yang adaptif dan kontekstual.

Pelatihan menjadi sarana strategis dalam upaya peningkatan kapasitas tersebut. Melalui pelatihan, tutor dan pengelola diberikan pemahaman konseptual dan

keterampilan praktis mengenai pendekatan kurikulum berbasis kebutuhan, teknik analisis kebutuhan belajar, pengembangan tujuan pembelajaran yang relevan, serta penyusunan program pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Sebagaimana ditegaskan oleh Joyce & Showers (2002), pelatihan yang efektif tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberikan kesempatan untuk praktik langsung, umpan balik, dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa pelatihan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan tutor serta pengelola dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap karakteristik peserta didik.

Solusi selanjutnya yaitu menerapkan prinsip perencanaan partisipatif, melibatkan tutor, peserta didik, dan pemangku kepentingan dalam penyusunan silabus dan rencana pembelajaran. Dalam konteks pengembangan kurikulum, penerapan prinsip perencanaan partisipatif merupakan pendekatan strategis yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, terutama tutor, peserta didik, dan pemangku kepentingan, dalam proses perencanaan dan penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Adapun solusi dalam pengorganisasi kurikulum yaitu melakukan penataan ulang beban kerja tutor agar lebih seimbang dan mempertimbangkan keahlian masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta, terdapat ketimpangan dalam pembagian beban kerja antar tutor. Beberapa tutor menerima tugas yang lebih banyak dibandingkan yang lain, sementara ada pula tutor yang mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Hal ini berdampak pada menurunnya efektivitas pembelajaran dan potensi kejenuhan kerja.

Kondisi tersebut juga sejalan dengan temuan Uno (2011), yang menyatakan bahwa kelebihan beban kerja dan ketidaksesuaian tugas dengan kompetensi pendidik dapat menurunkan motivasi kerja dan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penataan ulang beban kerja harus dilakukan dengan memperhatikan: Jumlah jam mengajar masing-masing tutor, Kesesuaian mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan tutor, Pengalaman dan sertifikasi tutor dalam bidang tertentu, dan beban tambahan seperti tugas administrasi, pendampingan, dan pengembangan bahan ajar. Selanjutnya solusi dalam pelaksanaan kurikulum yang ditemukan dalam penelitian yaitu penyediaan bahan ajar kontekstual dan berbasis pengalaman nyata peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan bahan ajar dalam Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SPNF SKB Kota Yogyakarta dan SPNF SKB Kota Surakarta telah berupaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penyediaan bahan ajar kontekstual dan berbasis pada pengalaman nyata peserta didik.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hasil evaluasi program Pendidikan Kesetaraan Paket C telah dimanfaatkan oleh pengelola dan pendidik sebagai dasar untuk melakukan berbagai perbaikan, baik dalam aspek perencanaan pembelajaran maupun penyempurnaan program secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan keterkaitan erat dengan teori evaluasi pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana (2004) yang menyatakan bahwa pemanfaatan hasil evaluasi penting dilakukan guna memperbaiki rencana pembelajaran dan menyempurnakan program secara berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya menjadi instrumen untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga berfungsi sebagai alat refleksi bagi penyelenggara pendidikan dalam meningkatkan efektivitas program.

## CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian multisitus dan pembahasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa kedua lembaga tersebut menerapkan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C. Manajemen kurikulum dilakukan melalui empat tahap, pertama perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, melalui jadwal yang fleksibel, pendekatan kontekstual, dan integrasi kecakapan hidup. Pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi, penyesuaian jadwal, serta penempatan pamong belajar sesuai kompetensi. Pelaksanaan kurikulum bersifat adaptif, menggunakan metode tatap muka, daring, atau blended learning, dengan pendekatan andragogik dan dukungan teknologi informasi. Evaluasi dilaksanakan secara berkala, baik internal maupun eksternal, mencakup aspek perencanaan hingga hasil pembelajaran, sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, meliputi keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten di bidang kesetaraan, rendahnya motivasi dan partisipasi peserta didik akibat faktor pekerjaan, usia, dan tanggung jawab keluarga, serta tantangan dalam pengintegrasian Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, khususnya terkait adaptasi materi, penilaian berbasis kompetensi, dan fleksibilitas pembelajaran. Selain itu, keterbatasan anggaran turut menghambat pengembangan profesional SDM dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Solusi yang diterapkan meliputi peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan pendampingan intensif dalam manajemen kurikulum, pembelajaran kontekstual, serta pemanfaatan TIK. Pendidik juga menerapkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal disertai komunikasi intensif guna membangun motivasi warga belajar. Kurikulum diadaptasi secara kontekstual sesuai karakteristik lokal dan kebutuhan peserta didik, dengan penekanan pada kompetensi dasar dan keterampilan hidup. Kendala anggaran diatasi melalui efisiensi dana dan penguatan kemitraan. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi ini dengan fokus pada aspek implementasi kebijakan atau model manajemen kurikulum yang inovatif pada pendidikan kesetaraan di berbagai daerah lain.

## REFERENCES

- Arikunto, S. (2009). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas. (2006). *Petunjuk Pelaksanaan Program Paket C*. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
- Fauziah, N. M., Huriyah, L., & Ibrahim, A. M. (2024). Curriculum Management of Package C Equivalent Program in Preparing Graduates Ready to Work in PKBM Alam Rumah Matahari Sukodono Sidoarjo. *Educational Insights*, 2(2), 87-97.
- Joyce, B., & Showers, B. (2002). *Student Achievement Through Staff Development*. Alexandria: ASCD.
- Kauchak, D. P., & Eggen, P. D. (2012). *Learning and Teaching: Research-Based Methods* (6th ed.). Boston: Pearson.
- Laksono, B. A., Hamdan, A., & Alviansyah, M. R. (2023). Pengaruh Stigma Lulusan Pendidikan Kesetaraan Terhadap Keputusan Rekrutmen Di Dunia Kerja. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 6(2), 105-114.
- Lazwardi, D. (2017). Manajemen Kurikulum sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(1), 119-125.

- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasbi, I. (2017). Manajemen kurikulum: Sebuah kajian teoritis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2).
- Pangestu, L. F., Yuliani, L., & Darusman, Y. (2021). Manajemen Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jendela PLS*, 6(2), 85-94.
- Raharjo, T. J., & Suminar, T. (2019). Penerapan Pedagogi dan Andragogi pada Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket A, B, dan C di Kota Semarang. *Edukasi*, 13(1).
- Rusman. (2011). *Pengembangan Model Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, D. (2015). "Stigma Sosial terhadap Pendidikan Kesetaraan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 9(1), 12-20.
- Sudjana, N. (2001). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syaputra, R., & Shomedran, S. (2023). Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Pada Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kota Palembang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(1), 17-34.
- Tyler, R. W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. University of Chicago Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19.
- Uno, H. B. (2011). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widiastuti, N. (2019). Dampak Perubahan Kurikulum terhadap Pendidikan Kesetaraan: Perspektif Pengelola dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 17(3), 44-56.